

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/358916133>

Hak-Hak Reproduksi dan Pendidikan Seksualitas-Perspektif Ekonomi Feminis

Chapter · September 2009

CITATIONS

0

READS

42

2 authors:



[Antonius Budisusila](#)

Sanata Dharma University

18 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

SEE PROFILE



[Victoria Sundari Handoko](#)

Atma Jaya University Yogyakarta

15 PUBLICATIONS 29 CITATIONS

SEE PROFILE

RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI:

MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN



Editor: Antonius Budisusila, SE, M.Soc.Sc.

Kata Pengantar: Dr. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ.

Prolog: Prof. Dr. James Spillane, SJ.

Epilog: Drs. Titus Odong Kusumajati, MA.

**RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI:
MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN**

**RAKYAT, PENDIDIKAN,
DAN EKONOMI:
MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI
KERAKYATAN**

*Pandangan dari Para Sahabat
Mengenang Drs. Theo Gieles Gilarso, SJ.*

Editor

Antonius Budisusila, S. E., M. Soc. Sc.

Kata Pengantar

Dr. Paulus Wiryono Priyotamtama, SJ.

Prolog

Prof. Dr. James Spillane, SJ.

Epilog

Drs. Titus Odong Kusumajati, MA



Pusat Pengembangan Manajemen
Fakultas Ekonomi USD
bekerjasama dengan
Penerbit Universitas Sanata Dharma

RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI: MENUJU PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN

© USD 2009

PENERBIT UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Ext. 1527/1513
Fax. (0274) 562383
Jl. Affandi, Gejayan Mrican Yogyakarta 55281
e-mail: lemlit@staff.usd.ac.id

Budisusila, Antonius (Ed.)

Cetakan Pertama

xxv, 239 hlm.; 14.8 x 21 mm

Bibliografi: hlm. 233

ISBN : 978-979-1088-32-9

EAN : 9-789791-088329

Desain Cover: Pius Sigit

Judul Ilustrasi Sampul:

“Sejak Pagi Hujan Tak Reda” oleh Surya Wirawan

Editor Bahasa : S. E. Peni Adji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Dr. Paulus Wiryana Priyatamtama, SJ.)	v
Daftar Isi	xix
Daftar Gambar dan Tabel	xxi
Prolog: Drs Theo Gilies Gilarso, SJ-Sang Ekonom Pendidik (Prof. Dr. Jammes Splillane, SJ.)	1
BAGIAN I: PENDIDIKAN BAGI PENGGERAK DAN GERAKAN RAKYAT	
BAB 1 Pergumulan Ikatan Petani Pancasila Usaha oleh dan untuk Kaum Tani Menuju Kemandirian (<i>Dr. G. Budi Subanar, SJ.</i>)	21
1. Pengantar	21
2. Kemunculan Gerakan	22
3. Perkembangan Gerakan	25

	4 Pendidikan Kemandirian (Petani) Selanjutnya	28
	5. Nasib Petani Jaman Sekarang	31
BAB 2	Ekonomi, Garis Massa dan Pendidikan (<i>Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	35
	1. Pengantar	35
	2. Arena Ekonomi, Kekuasaan dan Kebutuhan	37
	3. Kelembagaan Ekonomi Sekarang	42
	3.1. Teori Pasar dan Pilihan Publik	42
	3.2. Pendidikan dan Garis Massa	46

BAGIAN II: EKONOMI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN EKONOMI

BAB 3	Globalisasi Pendidikan: Permasalahan dan Tantangan bagi Perguruan Tinggi Indonesia (<i>Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.</i>)	53
	1. Pengantar	53
	2. Lingkungan Eksternal Pendidikan Tinggi dan permasalahannya	56
	3. Bagaimana Menjawab Tantangan Global Pendidikan Tinggi?	61
	4. Penutup	70
BAB 4	Pendidikan dalam Pusaran Arus Industrialisasi Global: Implikasi Bagi Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen (<i>Dr. Ike Janita Dewi, M.B.A.</i>)	73
	1. Pengantar	73
	2. Industrialisasi dan Liberalisasi Pendidikan di Indonesia	76
	3. Peringkat sebagai Indikator Kualitas Pendidikan Tinggi	78
	4. Misi dan <i>Brand</i> Perguruan Tinggi	84

	5. Implikasi pada Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Manajemen di Indonesia	89
	6. Penutup	93
BAB 5	Meredefinisi Pendidikan Ekonomi Dasar: Suatu Pemberdayaan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis pada Ekonomi Rakyat (<i>Drs. Hyginus Suseno Triyanto Widodo, M.S.</i>)	97
	1. Pengantar	97
	2. Perspektif Makro	100
	3. Konsumsi dan Produksi	101
	4. Pendapatan Masyarakat	103
	5. Pengangguran	104
	6. Kenaikan Harga (Inflasi)	105
	7. Pengeluaran Pemerintah dan Pajak	107
	8. Perdagangan Internasional	109
	9. Kemakmuran Bangsa	110
	10. Persamaan Makro	111
	11. Perspektif Mikro	114
	12. Permintaan dan Penawaran	114
	13. Perilaku Konsumen dan Produsen	117
	14. Penutup	119
BAB 6	Pemimpin dan Kepemimpinan Intelektual (<i>Dr. H. Herry Maridjo, M.S.</i>)	123
	1. Pengantar	123
	2. Pemimpin dan Kepemimpinan	126
	3. Peran Pemimpin dalam Organisasi	128
	4. Manajer dan Pemimpin	129
	5. Tipe-Tipe Kepemimpinan	132
	6. Teori-Teori Kontemporer Kepemimpinan	136
	7. Pendidikan Tinggi: Mampukah Menyiapkan Pemimpin?	140

	8. Pendidikan Tinggi: Pembentuk Manusia Bermoral dan Berintelektual	143
	9. Kesimpulan	145
BAB 7	Merajut Mata Rantai <i>Learning Society</i> : Suatu Pengamatan pada Industri Penerbitan Buku (<i>Vinantius Mardi Widyadmono, S.E., M.B.A.</i>)	149
	1. Pengantar	149
	2. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa	151
	3. Membangun <i>Learning Society</i>	153
	4. Industri Penerbitan dan <i>Learning Society</i>	158
	5. Selanjutnya (<i>Follow-up</i>)	164
	6. Himbauan	165

BAGIAN III: EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN RAKYAT

BAB 8	Ekonomi Kependudukan Indonesia: Paradigma, Praktik, dan Kritik (<i>Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.</i>)	169
	1. Pengantar	169
	2. Perkembangan Paradigma Kependudukan	170
	3. Keluarga Berencana dan peningkatan Kualitas Hidup di Indonesia	174
	4. Penutup	176
BAB 9	Peran Strategis Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga bagi Pemberdayaan Rakyat (<i>Drs. V. Supriyanto, M.S.</i>)	181
	1. Latar Belakang Perlunya Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	181
	2. Pengertian Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	184
	3. Sasaran, Tujuan, dan Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185

3.1. Sasaran Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	185
3.2. Tujuan Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	186
3.3. Materi Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga	187
4. Masalah yang dihadapi Setiap Keluarga	189
5. Pemecahan Masalah Khusus	191
6. Pelaksanaan Anggaran	196
7. Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga sebagai Pemberdayaan Rakyat	198
BAB 10 Hak-Hak Reproduksi dan Pendidikan Seksuali- tas: Suatu Perspektif Para Ahli Ekonomi Feminis (<i>Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si. & Antonius Budisusila, S.E., M.Soc.Sc.</i>)	203
1. Pengantar	203
2. Teori dan Pendekatan Kependudukan	204
3. Sikap Agama Katolik Atas Keluarga Beren- cana	209
4. Metode Ovulasi: KBA ala JJ Billings	210
5. Kesetaraan Gender: Kunci Sukses KBA	212
6. Kesetaraan Dan Kesehatan Reproduksi	216
7. Penutup	218
Epilog: Menuju Pendidikan Ekonomi Kerakyatan (<i>Drs. Titus Odong Kusumajati, MA</i>)	221

BAB 10

HAK-HAK REPRODUKSI DAN PENDIDIKAN SEKSUALITAS: Suatu Perspektif Para Ahli Ekonomi Feminis

Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si.

Antonius Budisusila, S.E., M. Soc. Sc.

1. Pengantar

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) mendapatkan tanggapan yang serius dari berbagai pihak jauh sebelum diselenggarakan International Conference on Population and Development atau ICPD pada tahun 1994. Hal ini disebabkan terdapat beberapa negara yang menerapkan kebijakan Keluarga Berencana yang berimplikasi pada hak kesehatan seksual dan reproduksi salah satu jenis kelamin diabaikan. Contoh yang mendapat kritikan tajam di Konferensi ICPD (Sadli, 2007:29) adalah kebijakan tentang "*one child policy*" yang diterapkan Pemerintah RRC pada saat itu. Kebijakan lain yang juga dikritik adalah bahwa dalam upaya mensukseskan program keluarga berencana,

berbagai negara memakai cara paksaan dalam penggunaan alat kontrasepsi, tanpa memberikan banyak pilihan bagi perempuan pengguna kontrasepsi yang bisa menyebabkan dampak sampingan (*side effect*) yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan/atau psikologisnya.

Kenyataan tersebut di atas telah mendorong perempuan dari sejumlah negara dan penganut agama yang berbeda-beda, khususnya yang beragama Katolik memperjuangkan hak kesehatan seksualitas dan reproduksi yangimbang (setara) antara kedua jenis kelamin. Belajar dari pengalaman hidup Rama Gieles semasa hidupnya yang aktif dalam memberikan pendidikan seksualitas dan reproduksi bagi calon pasangan suami isteri. Dalam pembelajaran tersebut, hal yang terpenting adalah sikap gereja Katolik agar pasangan suami-istri Katolik memilih program Keluarga Berencana Alamiah (KBA). Pembelajaran tersebut sebagai satu gerakan bersama akan pentingnya individu mandiri yang memiliki sensitivitas berkeadilan gender dalam seksualitas dan reproduksi bagi pasangan suami isteri Katolik.

2. Teori dan Pendekatan Kependudukan

Pertumbuhan populasi di Indonesia, terutamanya di Jawa, telah mendapatkan perhatian oleh para ahli sejak abad ke-19. Perkiraan penduduk Jawa oleh Nederburgh pada tahun 1795 dan sensus penduduk yang dibuat Raffles pada tahun 1815 telah menggambarkan keadaan kependudukan di Jawa. Pada masa itu digambarkan bahwa ciri-ciri populasi di Jawa bukan hanya sedang tumbuh dengan pertumbuhan tinggi pada abad ke-20, tetapi ini telah tumbuh sejak sensus pertama kali dibuat, kepadatan penduduk di Jawa selalu berada pada peringkat yang sangat tinggi di negara ini. Oleh karena itu, Benjamin White menyatakan bahwa: *...karena sejak 1815, Jawa selalu merupakan suatu daerah yang paling padat penduduk di Asia Tenggara....*" (White, 1974:64). Ini berarti bahwa perhatian dan perdebatan

pertumbuhan penduduk bukan hanya persoalan jumlah populasi *perse*, tetapi pada sebab-sebab dan cara mengatasinya.

Menurut Coontz (1961: 9-15) sejak pemikiran Malthus telah terdapat tiga teori yang telah mencoba memberikan penjelasan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan populasi yaitu pendekatan biologi, budaya, dan ekonomi. Pendekatan biologis memberikan pengertian bahwa suatu pengaturan pertumbuhan populasi manusia sejenis dengan pengaturan populasi hewan dan tumbuh-tumbuhan (Coontz, 1961:15). Pendekatan kultural memberikan pengertian bahwa suatu pertumbuhan penduduk ditentukan oleh penggabungan berbagai bagian elemen-elemen budaya, baik material maupun bukan material, keyakinan matrilineal dan patrilineal, serta penurunan relatif masa senggang pada saat menjadi orang tua dapat mempengaruhi perilaku pada reproduksi (Coontz 1961; 16). Sementara itu, pendekatan ekonomi populasi menempatkan populasi sebagai pengubah tidak bebas (*dependent variable*) suatu fungsi dari pembangunan ekonomi (Coontz, 1961:20).

Ketiga pengertian teori tersebut dapat berpengaruh pada suatu cara berpikir dan pengambilan keputusan yang diambil untuk pengaturan pertumbuhan penduduk. Kebijakan pemerintahan orde-baru secara dominan mengambil paradigma pada teori pemikiran pertama dan ketiga yang kontrol kelahirannya dilakukan dengan menggunakan suatu teknologi kontrasepsi (Ananta dan Pungut, 1992), bahkan dimengerti secara sempit sebagai pemanfaatan teknologi kontrasepsi saja. Oleh karena itu, pendekatan ini menjelaskan bagaimana dapat menghindari suatu ledakan penduduk mengikuti gaya pikir Kaum Malthusian.

Para pendukung pemikiran ekonomi kependudukan memaparkan beberapa temuan, terutamanya di Jawa bahwa sebab-sebab pertumbuhan penduduk ialah 1) kemiskinan yang disebabkan permintaan tenaga kerja dari suatu pengelolaan

pertanian dan buruh pada masa kolonial (Boeke, 1953:170; White 1973:224) dan 2) strategi bertahan hidup pada masa revolusi hijau dilakukan (White, 1976). Pandangan demikian akan mendorong kepentingan akan peningkatan standar hidup—menyediakan kecukupan kebutuhan dasar manusia—sebagai suatu persyaratan utama mengatasi pertumbuhan penduduk. Seorang ahli ekonomi Neoklasik, Oshima (1983) menyarankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kurva analisis manfaat-kos yang digambarkan White (1976) berhubungan dengan pertumbuhan populasi di Jawa; dapat dikatakan bahwa perbandingan tujuan utama memelihara standar kehidupan dan waktu senggang pada masa kolonial dan masa sekarang, menunjukkan bahwa biaya dari memproduksi dan menambah anak lebih tinggi berbanding biaya untuk tidak memproduksi anak sehingga rumah tangga akan mempunyai lebih sedikit anak. Konsep kemiskinan bukan bermakna “absolut” tetapi mempunyai makna “deprivasi relatif”, sehingga mekanisme kausalitas dari peningkatan kesejahteraan atau standar hidup tersebut terhadap penurunan populasi tidak seharusnya dipahami melalui kerangka “manfaat absolut” tetapi melalui mekanisme “manfaat relatif”. Beberapa mekanisme ini dapat diidentifikasi melalui peningkatan biaya untuk hidup, termasuk juga biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak yang dapat diukur melalui indeks kebutuhan fisik minimum, indeks upah pertanian dan bukan pertanian, dan indeks daya pembayaran.

Pendekatan kultural dapat dilakukan melalui suatu proses membangun dan membangkitkan kesadaran melalui pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kritis yang berkelanjutan. Pendekatan demikian merupakan cara yang kurang banyak dijalankan sebagai suatu alternatif lain untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Penduduk yang banyak merupakan potensi yang dapat digunakan untuk mendukung

pembangunan nasional yang menyeluruh apabila “populasi” tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan. Oleh karena itu, usaha-usaha meningkatkan kepandaian, kemampuan, kemahiran dan pengetahuan rakyat berhubungan dengan, masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan reproduksi harus diusahakan secara terus-menerus.

Tabel 4.1. Presentase Pertumbuhan Penduduk di Jawa dan Indonesia Tahun 1950-2000

Masa	Jawa	Luar Jawa	Indonesia	Cek Populasi ⊕/⊖
1951-1960	2.0	2.0	2.0	Ledakan kelahiran bayi akibat berakhirnya perang dunia II ⊕
1961-1970	1.9	2.2	2.0	PKI dihabisi dan dibuang ke pulau lain (terutama di Jawa ⊖)
1971-1980	2.0	3.4	2.4	Keberhasilan pertama revolusi hijau ⊕ Keluarga berencana ⊖
1981-1990	1.7	2.3	1.9	Transmigrasi (Jawa ⊖ dan Luar Jawa ⊕) Keluarga berencana ⊖ Konflik Timor-Timur ⊖ Konflik Aceh ⊖
1991-2000	1.28	1.95	1.38	Keluarga berencana ⊖ Amuk masa dan Kerusuhan Mei ⊖; Konflik di Aceh ⊖

Sumber: Wahono (1998:8) dan BPS, 1991-2000

Keberhasilan revolusi hijau yang mulai dirasakan rakyat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan harapan masyarakat dalam keamanan dan tingkat konsumsi untuk masa depan. Keadaan ini dapat memperkuat hasrat masyarakat untuk mempunyai anggota keluarga yang lebih besar. Ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan yang relatif tinggi pada masa 1971 sampai 1980. Berdasarkan data pada tabel di atas, program Keluarga Berencana melalui pemanfaatan teknologi kontrasepsi kurang berhasil mengurangi pertumbuhan

penduduk secara signifikan.

Beberapa program pemerintah mendorong kesadaran bersekolah sesudah era-1980. Peningkatan hasrat untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang semakin tinggi, termasuk dari keluarga-keluarga miskin telah mendorong keluarga untuk mengurangi hasrat mempunyai anak lebih banyak karena beban biaya sekolah yang harus ditanggung. Keadaan ini menjadikan pertumbuhan penduduk relatif menurun pada era 1980-1990-an. Setidaknya, kesadaran bersekolah telah menggeser nilai anak dari sumber pemasok tenaga kerja pertanian kepada nilai anak yang perlu diinvestasikan melalui pendidikan. Pelaksanaan pemberdayaan kader Keluarga Berencana Lestari, serta pemberian beasiswa bagi sekolah anak-anak dari keluarga *catur warga* telah mendorong kesadaran bersekolah. Bahkan keberhasilan beberapa keluarga KB Lestari, disertai pendidikan intensif di perdesaan telah mengkonstruksikan "*catur warga*" sebagai alternatif keluarga yang mempunyai peradaban modern bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran bersekolah, deprivasi relatif (pencapaian kebutuhan hidup yang lebih rendah/tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan) dan penggunaan kontrasepsi telah berhasil mengurangi pertumbuhan penduduk secara signifikan. Penurunan pertumbuhan penduduk di Jawa juga disebabkan oleh pelaksanaan program transmigrasi ke Luar Jawa yang terus dilakukan oleh Dinas Transmigrasi. Program tersebut secara otomatis meningkatkan penduduk Luar Jawa, tetapi pertumbuhan penduduk di Luar Jawa tidak mengalami peningkatan.

Tidak dipungkiri, perang politik 1965, pemberangusan Gerakan Partai Komunis turut berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk. Bahkan pertikaian ini masih mewarnai sejarah bangsa ini hingga sekarang seperti konflik dan suasana pertikaian yang berkelanjutan seperti yang terjadi di Aceh, Sulawesi, Kalimantan, dan Timor-Timur (sebelum memisahkan

diri dari Republik ini) merupakan bentuk kekerasan yang mengerem pertumbuhan penduduk. Para pendukung Malthus meyakini bahwa penyakit, konflik, peperangan, dan pertikaian sebagai gejala dan mekanisme alamiah faktor pengurang jumlah penduduk. Tetapi, penurunan jumlah penduduk yang terjadi akibat pertikaian sosial, amuk masa dan pembunuhan massal, bahkan kematian akibat kesulitan ekonomi, kelaparan dan beban biaya hidup yang semakin mahal akibat krisis ekonomi perlu dilihat sebagai suatu kegagalan ketimbang keberhasilan mengontrol kependudukan, bahkan harus dituding sebagai bentuk ketidakadilan.

3. Sikap Agama Katolik atas Keluarga Berencana (KB)

Proses reproduksi manusia terjadi melalui proses seksual, untuk itu membicarakan persoalan reproduksi tidak lepas dari pembicaraan tentang seksualitas. Persoalan reproduksi manusia mendapatkan perhatian tidak hanya dari kalangan profesi kesehatan, aktivis, tetapi juga pemerintah di seluruh dunia, yang mencapai puncaknya pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo. Bab VII dari *Plan of Action* hasil ICPD tahun 1994 adalah :

Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. It implies that people have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit in this is the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for regulation of fertility, which are not against the law, and the right of access to health care services that will enable women to go safely through pregnancy and childbirth. Reproductive health care also includes sexual health, the purpose of

which is the enhancement of life and personal relations.

Salah satu yang menarik dari *Plan of Action* hasil ICPD di atas adalah adanya hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi dan mendapat akses pada perencanaan keluarga yang aman, efektif, terjangkau dan layak atas pilihan sendiri, sebagaimana juga cara-cara lain untuk mengatur kesuburan, yang tidak melanggar hukum. Terkait dengan Keluarga Berencana, Agama Katolik termasuk salah satu agama yang memberikan sikap tegas terkait dengan program Keluarga Berencana termasuk dan Kesehatan Reproduksi (KR).

Sebagaimana tertuang dalam pedoman Pastoral Keluarga Tahun 1975 No.26, Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk melaksanakan program KB dengan cara abstinensia dan pantang berkala (tidak melakukan persetubuhan saat masa subur). Agama Katolik tidak melarang umatnya ber-KB, namun membatasi cara-cara ber-KB dengan beberapa pilihan terbatas. Juga dalam Kesehatan Reproduksi, agama Katolik sangat menjunjung tinggi hak-hak individu dalam membangun kesehatan reproduksinya secara mandiri dan bertanggungjawab.

Sikap Agama Katolik atas program Keluarga Berencana alamiah disosialisasikan dan diimplementasikan melalui pendidikan seksualitas dan reproduksi bagi pasangan calon suami isteri. Hal ini untuk mendorong umatnya mematuhi dan melaksanakan sikap yang telah diambil gereja atas Keluarga Berencana.

4. Metode Ovulasi: KBA ala JJ Billings

Pendidikan seksualitas dan reproduksi yang dikerjakan untuk para calon pasangan suami isteri telah mendapatkan perhatian serius oleh Gereja Katolik. Rama Gieles, SJ, sebagai misionaris yang menggeluti bidang ini, telah menyusun seri pengajaran untuk "pendidikan seksualitas" dengan contoh

dari buku maupun dari foto yang diambil sendiri. Bahkan, media pendidikan seksualitas terus dikembangkan dengan menggunakan gambar, slides, dan video untuk membuat peserta memahami pendidikan secara mudah. Bersama anggota panitia serta anggota untuk Kursus Persiapan Perkawinan (KPP), pendidikan diselenggarakan setiap dua bulan sekali di Yogyakarta untuk calon suami-isteri yang ingin menikah di Gereja Katolik. Dia juga mengembangkan suatu program atau acara akhir pekan untuk mengajar moralitas yang berkaitan dengan seksualitas di kampus, yang dinamakan "*Weekend Moral*".

Upaya memperkenalkan pendidikan seksual melalui pengenalan metode ovulasi Billings diterima sebagai cara alamiah untuk mendapat atau menghindari kehamilan, tidak berbahaya, dapat dipercaya dan dari segi moral dapat diterima. Melalui suatu mekanisme pengamatan yang cermat terhadap cairan tubuh yang keluar dari liang sanggama, perubahan warna dan kepekatannya dapat ditentukan masa subur dan tidak subur. Keluarga Berencana Alamiah ini diterima sebagai pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap pasangan. Komitmen dengan KBA adalah suatu pertimbangan moral atas perkembangan alat-alat kontrasepsi yang dipaksakan melalui Program Pemerintah masa Orde Baru seperti IUD, Spiral, Susuk, Pil, dan Kondom.

Pada dasarnya, anak lahir ke dunia adalah anugerah dari Allah pencipta kehidupan. Berbagai penggunaan alat kontrasepsi, terutamanya IUD dan Spiral mempunyai kecenderungan untuk menghambat tumbuhnya orok atau janin paska nidasi (bertemunya sperma dan ovum). Cara demikian ini disinyalir sebagai suatu cara yang kurang manusiawi, bahkan terdapat tendensi terjadinya aborsi. Sementara itu, penggunaan KB Susuk juga dipandang akan berdampak pada infeksi akut pada perempuan, di samping pemasangan dan pengambilan susuk yang seringkali berbiaya tinggi. KB dengan Pil juga membawa

efek samping berupa makin gemuk atau kurus pada perempuan pengguna. Sementara kondom relatif bisa diterima sebagai alternatif bagi KBA, bahkan kontrasepsi ini dianggap mengurangi beban perempuan sebagai pemilik tubuh yang selalu dijadikan objek oleh program-program Keluarga Berencana di negeri ini.

5. Kesetaraan Gender: Kunci Sukses KBA

Pemikiran ekonomi arus kuat yang lebih bersifat rasional (*economic rational man*) telah kehilangan koneksinya dengan berbagai dimensi kapabilitas etika. Dimensi etik dari ekonomi yang luput dari karakteristik dasar makhluk manusia adalah komitmen, emosi, deliberasi, dan berbagai perbedaan bentuk interaksi manusia. Pandangan Amarta Sen tentang kapabilitas dan komitmen, serta Irene van Staveren tentang kepedulian, emosi, dan deliberasi menempatkan manusia selalu mencoba untuk menemukan keseimbangan dalam mengatasi berbagai kelangkaan yang dipunyai. Mereka juga akan menimbang eksese dan defisiensi suatu kejadian untuk mencari jalan tengahnya. Oleh karena itu, nilai ekonomi *post rational economic man* adalah kebebasan ekonomi, keadilan, dan kepedulian harus juga diseimbangkan bagi tercapainya tujuan pada situasi prasarana dan sumberdaya yang bersifat langka.

Studi dan pengarusutamaan gender terkait pada bidang ilmu ekonomi di negeri ini masih sangat sedikit. Padahal, suatu proses pendidikan dan pemberdayaan perempuan di pedesaan tempat masalah ekonomi merupakan masalah yang seringkali membalut berbagai masalah yang lebih substansial seperti ketidaksetaraan posisi, status, keseimbangan kekuasaan dalam berbagai perbedaan interaksi sosial. Fenomena ekonomi, produksi dan kuasa perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya, akses informasi bagi memenuhi hak-hak seksual dan reproduksi seringkali saling berkaitan. Beberapa penelitian di

lapangan membuktikan bahwa produksi dan otoritas reproduksi perempuan mempunyai relasi yang tidak tunggal. Benyamin White³⁰ (1975) dalam penelitian di sebuah desa di Yogyakarta menemukan bahwa produksi sebagai sumber-sumber eksistensi dan kuasa perempuan untuk berperan besar dalam hal meningkatkan kesejahteraan diri dan rumah tangganya. Tetapi, kemampuan perempuan berperan dalam kegiatan ekonomi produksi tidak menjamin keterhubunganannya dengan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Pandangan lain, menurut para ekonom feminis³¹, Irene van Staveren (2002) menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan memberikan suatu sumber kuasa, harga diri, dan kebebasan bagi perempuan untuk memilih, berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan domestik maupun publik, bahkan terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak reproduksi dan seksual.

Dua pandangan tersebut bukan suatu perspektif yang dikotomis. Sejatinya dua perspektif itu mempunyai suatu penjelasan contoh (*example explanation*) yang relevan untuk mengemukakan kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi berikut memberikan beberapa contoh yang terjadi di lapangan.

Saya memutuskan menikah dengan sopir di penggilingan padi orang tua. Setelah saya menikah orang tua mewariskan perusahaan itu kepada keluargaku, setiap hari saya mengurus perusahaan itu bersama suami. Saya berharap dengan mengelola bersama, suami dapat memberikan suatu pandangan dan pendapat yang berguna bagi pengembangan penggilingan padi, pada kenyataannya juga demikian. Sayangnya, saya merasakan bahwa suamiku sering merasakan minder, tidak percaya diri dan seolah-olah tidak

30. Benyamin White (1975) "Production and Reproduction", PHD Dissertation,

31. Lihat Irene van Staveren (2002) *The Values of Economics*, London and New York: Routledge

punya kuasa.....ini bukan yang saya harapkan karena kemudian berdampak pada relasi yang tidak seimbang...baik dalam pengelolaan usaha, rumah tangga, bahkan pada relasi-relasi yang lebih pribadi (seksual).....pada banyak hal suamiku lebih pasif, mestinya ini tidak terjadi (diceritakan oleh Ibu Purwanti, di Bantul)

Senada dengan Ibu Purwanti di atas bahwa:

*Seringkali pulang dari jualan di pasar kota saya sudah sore, kalau badan lagi tidak enak atau lagi sakit gitu, pinginnya ya langsung tidur tapi mau gimana lagi ya harus masih masak, ngurus anak, bersih-bersih rumah, danbelum lagi kalau malam-malam **dibrengkal** (dibangunkan) suami....**minta**...mau ditolak ya gimana sudah menjadi tugas istri melayani, kasihan suami to....., ya meski **nggedebok** (seperti pelapah pisang) ya sudah dilayani saja. (diceritakan oleh Ibu Winarti, di Gunungkidul)*

Pernyataan ini mencerminkan bahwa suatu regularitas yang membentuk kultur hegemoni³² di masyarakat. Hal ini menimbulkan perempuan yang berdaya secara ekonomi dapat dianggap menjadikannya aman bagi laki-laki atau justru sebaliknya laki-laki yang berdaya mengancam ketidakberdayaan perempuan. Pandangan yang bersifat stereotipe bahwa laki-laki harus mampu mencukupi kebutuhan keluarga, harus lebih mampu dalam segala hal, dan harus mendominasi masih merupakan perilaku umum dari masyarakat di pedesaan. Kedua realitas yang diceritakan oleh para ibu tersebut dapat melegitimasi pandangan pertama di atas. Namun, bicara mengenai peluang bagi perubahan, kemandirian ekonomi perempuan lebih mempunyai daya tawar dibandingkan ibu yang lebih banyak berperan di domestik saja, sehingga kebebasan bagi perempuan

32. Hegemoni dimengerti sebagai suatu tata nilai, pandangan yang memperkuat, mengawasi dan menciptakan relasi asimetris laki-laki dan perempuan. Bak menara pengawasan penjara, pesakitannya secara psikologis merasa dihantui oleh suatu pengawasan yang ketat, meski dalam menara tidak ada lagi yang mengawasi.

untuk memilih dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik rumah tangga maupun arena publik relatif terbatas. Meskipun terdapat juga faktor lain yakni pengetahuan dan pendidikan perempuan menentukan kelembagaan rumah tangga dan publik yang dikonstruksikan dan melekat pada kaum perempuan. Oleh karena itu, suatu transformasi secara radikal diperlukan bagi memberdayakan perempuan dan laki-laki sehingga hanya melalui suatu kesadaran tentang relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan, transformasi sosial dapat bekerja, termasuk aspek-aspek yang menyangkut hak-hak reproduksi dan seksual.

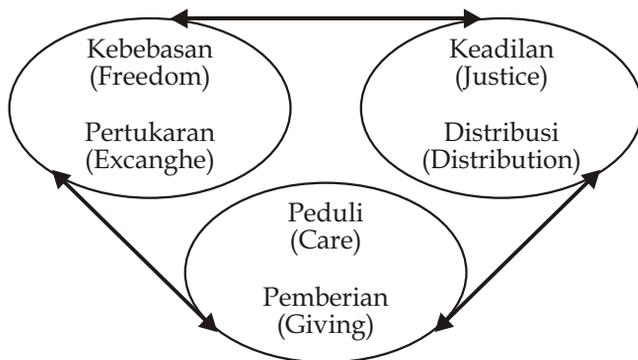
Untuk itu, relasi gender yangimbang akan dapat terealisasi ketika suami dan isteri dapat duduk bersama untuk mengatur seksualitas dan reproduksi mereka. Suami akan ikut belajar pada isterinya terkait dengan relasi seksualitas yang aman pada masa-masa tidak subur isterinya, serta belajar untuk memahami satu sama lain terkait dengan relasi seksualitas yang dikehendaki bersama. Bukankah sejatinya kesehatan seksual atau kehidupan seks yang sehat adalah kehidupan seks yang (Mohamad, 2007;14):

- a. sama-sama dinikmati oleh kedua belah pihak yang melakukannya,
- b. bebas dari pemaksaan, termasuk oleh suaminya sendiri sekalipun,
- c. bebas dari rasa takut,
- d. bebas dari kemungkinan tertulari penyakit.

Melalui model Keluarga Berencana Alamiah (KBA) yang dipilih oleh pasangan Katolik, memungkinkan relasi yang dialogis terjadi antara suami isteri dalam menciptakan kehidupan seks yang sehat, yang selanjutnya akan berimplikasi pada kesehatan reproduksi. Suami akan ikut mendampingi dan belajar bersama dengan isteri terkait dengan seksualitas dan reproduksi mereka.

4. Kesetaraan dan Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi, sebagai bagian dari kesehatan secara umum, dengan demikian juga merupakan hak asasi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Kesehatan reproduksi menurut UU No. 23/1992 merupakan keadaan sehat secara fisik maupun mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Suatu proses reproduksi pada manusia terjadi melalui proses hubungan seksual. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi tidak bisa dipisahkan dengan hubungan seksual. Hubungan dan kesehatan seksual yang sehat terjadi apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara setara. Setara ini dapat didefinisikan sebagai kedua belah pihak yang melakukan sama-sama menikmati, bebas dari paksaan, bebas dari rasa takut dan bebas dari kemungkinan tertulari penyakit.



Gambar 3.2. Domain Nilai dalam Ilmu Ekonomi dan Relasin

Kebebasan (*freedom*) merupakan nilai yang harus dikedepankan (Gambar 3.2.). Kesadaran memperoleh kebebasan merupakan awal terbangunnya kesadaran akan terjadinya suatu pertukaran peran, sehingga kehidupan sosial yang bias laki-

laki (patriarki) dapat berpeluang berubah. Perempuan yang lebih dominan bekerja, baik di publik dan sekaligus di domestik perlu dipertukarkan, sebab banyak terdapat pekerjaan yang semestinya tidak dilekatkan dengan seks dan berbagai bentuk stereotipe. Kesanggupan berubah dan membayar perubahan merupakan potensi pada terjadinya suatu kesetaraan.

Peluang terjadinya pertukaran, jika dibimbing oleh suatu etika pasar yang *bias kapital* juga tidak akan berpeluang pada lahirnya distribusi sumber-sumber, proses, pengambilan keputusan dan beban kerja yang sama. Oleh karena itu, distribusi beban, proses kerja, dan manfaat haruslah seimbang sehingga peluang menuju suatu interkasi yang berkeadilan akan semakin tinggi. Kebebasan dengan demikian harus dilampiri dengan suatu sistem distribusi yang *fair*, berhubungan dengan sumber, beban, proses dan hasil secara keseluruhan. Keseimbangan demikian memerlukan suatu pemahaman "*keseimbangan yang dinamik*" sejalan dengan perubahan dan perkembangan, bukan keseimbangan yang bersifat "*statis*".

Perubahan sosial demikian juga akan dapat dikerjakan seandainya komitmen dan kepedulian (*care*) itu hadir. Komitmen dan kepedulian merupakan dorongan tanpa *reserve* untuk berubah dan melakukan perubahan. Kepedulian akan terkait dengan pemberian (*giving*). Pemberian dalam konteks relasi yang tidak setara, untung-rugi dan bias kepentingan akan bermakna "hadiah" dan menjadi sarana penindasan dan syarat eksploitasi. Bahkan terdapat upaya-upaya dominasi kekuasaan yang memarginalisasi peran pihak satu (biasanya laki-laki) kepada pihak lain (biasanya perempuan). Tetapi, dalam konteks kesetaraan "pemberian" bisa bermakna penguatan, pemberdayaan dan kebangkitan untuk berperan secara merdeka.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, usaha-usaha membangun kemandirian ekonomi, serta penegakan hak reproduksi dan

seksual harus mengedepankan ketiga nilai substantif di atas. Prinsip-prinsip dasar ini akan menjadi landasan etika (*etichal justification*) yang mengakar pada pemberdayaan perempuan maupun laki-laki sehingga program demikian diharapkan mampu meningkatkan kemandirian perempuan dalam pengertian hak-hak berekonomi, berpolitik dan bersosial, termasuklah dalam hal kesehatan reproduksi dan seksual sebagai prioritas utama. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesehatan reproduksi dan seksual sebagai penentu dasar bagi kualitas kehidupan hari ini, esok dan masa depan.

5. Penutup

Pada akhirnya, pendidikan seksualitas (sebagaimana telah dimulai oleh Rm Gieles) adalah suatu pendidikan yang masih relevan di dalam konteks masyarakat sekarang. Hal ini merupakan bagian dari suatu pengembangan kesadaran akan hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi dan mendapat akses pada perencanaan keluarga. Tawaran metode ovulasi Billings sebagai suatu alternatif semestinya diterima sebagai cara alamiah untuk mendapat atau menghindari kehamilan, tidak berbahaya, dapat dipercaya dan dari segi moral dapat diterima. Namun begitu, kerangka pendidikan seksualitas seharusnya ditempatkan dalam suatu pengertian, analisis dan pendidikan kesetaraan gender yang menyeluruh. []

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik, *Indonesia dalam Angka 1991-2000*.
- Coontz, Sidney H.1961. *Population Theories and the Economic Interpretation*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Gilarso, Gieles T. 1981. *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- ICPD .1994. *Plan of Action*, Cairo.
- Mohamad, Kartono, 2007. "Kesehatan Reproduksi sebagai Hak", dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 53, Tahun 2007.
- Oshima, Harry T. 1983. "A Lewis Dualistic Theory and Its Relevance for Postwar Asian Growth, *The Developing Economies*", Vol. 4, No. 2 p. 1-26 (October).
- Sadli, Saporinah.2007. "Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Perubahan Undang-Undang Kesehatan" dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 53, 2007.
- Staveren, Irene van.2002. *The Values of Economics*. London and New York: Routledge.
- Wahono, Francis.1998. *The Socio-Economic Impact of The Green Revolution on Asset Class Relations: a Case Study in Two Javanese Villages*, unpublished Ph.D dissertation, School of Business, Faculty of Law and Management, Australia: La Trobe University.
- White, Benjamin. 1975. "Production and Reproduction", PHD Dissertation.